

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Peran

Peran merupakan perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh banyak orang terhadap seseorang yang memiliki kedudukan tertentu. Peran adalah deskripsi social tentang siapa kita. Peran menjadi bermakna Ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik. Secara sosiologis peran merupakan bentuk sikap atau tindakan yang dilaksanakan di masyarakat guna untuk melaksanakan kedudukannya dimana dalam kedudukan tersebut terdapat hak dan kewajiban yang sudah tertata untuk dijalankan sebagai pemangku posisi. Peran dinantikan oleh Masyarakat guna untuk keberlangsungan kehidupan dan jika terjadi perubahan sesuai keinginan lingkungan maka peran tersebut disebut peran yang berhasil.

Peran dimaknai sebagai tugas yang diberikan kepada seseorang untuk dijalankan serta tugas dari atasan yang harus dilaksanakan guna untuk mensejahterakan Masyarakat. Menurut (Gustin Ainun Majib, 2023:9) peran merupakan sesuatu yang muncul secara teratur karena suatu alasan, karena manusia merupakan makhluk social yang hidup berkelompok, sehingga anggota Masyarakat tersebut saling berinteraksi satu sama lain. Jadi peran tersebut merupakan bagian dinamis dari posisi seseorang Ketika orang tersebut menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisi yang dapat memenuhi peran tersebut.

Secara keseluruhan peran merupakan perwujudan nyata dari status social yang dijalankan melalui hak dan kewajiban, bersifat dinamis, dan diatur oleh norma social yang memungkinkan individu menyesuaikan perilaku sesuai dengan tuntutan

social serta menjaga keteraturan dalam interaksi social. Menurut (Bambang Ismanto, 2022:1) peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang karena status sosialnya, baik yang bersifat formal maupun informal. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa peran mengacu pada tugas yang harus dilakukan oleh seseorang karena memiliki posisi tertentu di lingkungan dia berada.

Peran adalah bentuk perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam situasi social tertentu dan deskripsi sosial tentang siapa kita, yang masuk akal Ketika kita terhubung dengan orang lain, komunitas social atau politik (Megi Tidangen et al, 2020:82). Peran yang ada dalam Masyarakat dapat diklasifikasikan bermacam-macam sesuai dengan sudut pandang yang diambil. Berikut merupakan beberapa jenis-jenis peran ;

1. Peran yang diharapkan

Masyarakat mengharapakan peran dilaksanakan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan. Peran ini merupakan peran yang tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan seperti apa yang telah ditentukan.

2. Peran yang disesuaikan

Dalam melaksanakan kewajiban harus lebih baik dari peran yang diharapkan, bahkan terkadang harus disesuaikan. Peran yang disesuaikan mungkin terkadang tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dianggap wajar oleh masyarakat. Peran disesuaikan bukan karena manusia pelakunya, tetapi karena faktor-faktor diluar manusia. Faktor tersebut dapat berupa kondisi dan situasi yang selalu baru dan sulit diprediksi sebelumnya.

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan atau status Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Dengan

demikian menunjukkan bahwa peran dikatakan telah dilaksanakan apabila seseorang dengan kedudukan atau status tertentu tersebut telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Peran dibagi menjadi 3 (tiga) cakupan yaitu :

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat dalam Masyarakat, peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai suatu organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur social masyarakat.

Ashidiqie (2020) menyampaikan bahwa peran meliputi aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang, jika seseorang sudah melaksanakan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia telah menjalankan perannya. Menurut (Adisa et al.,2021) mengemukakan dua asumsi pendekatan kritis teori peran yaitu pendekatan structural dan interaksional. Berdasarkan pendekatan structural maka peran diartikan sebagai seperangkat harapan internal dan eksternal yang dapat membimbing individu, dimana mereka dinilai atau menilai diri sendiri berdasarkan kesesuaian dengan harapan. Sedangkan pendekatan interaksional menjelaskan peran sebagai pola perilaku dan sikap yang komprehensif berkaitan dengan identitas atau entitas tertentu yang dilakukan oleh individu yang berbeda.

Peran terdiri dari tiga hal, yaitu pedoman yang mengatur seseorang dalam masyarakat, dalam hal ini peran merupakan norma yang mengajarkan tentang bagaimana hidup dalam komunitas yang lebih besar. Norma yang ada dalam peran sangat penting untuk mengatur atau mengendalikan perilaku seseorang. Ada tiga

hal yang termasuk dalam peran, yaitu peran merupakan konsep tentang apa yang boleh dilakukan orang dalam masyarakat sebagai sebuah organisasi, juga dapat didefinisikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur social. Peran mencakup norma-norma yang berkaitan pada kedudukan atau tempat seseorang dalam Masyarakat. Berikut ini merupakan beberapa dimensi peran yaitu :

- 1) Peran Sebagai suatu kebijakan, dalam hal ini peran merupakan suatu kebijakan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.
- 2) Peran sebagai strategi, dalam dimensi ini peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
- 3) Peran sebagai alat komunikasi, peran digunakan sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan.
- 4) Peran sebagai penyelesaian sengketa, peran digunakan sebagai suatu cara untuk menyelesaikan konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada.
- 5) Peran sebagai terapi, peran dilakukan sebagai upaya masalah-masalah psikologi masyarakat, seperti rasa tidak percaya diri tentang mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.

1. Peran Pemerintah Mediasi

Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah, dimana terdapat pihak yang tidak memihak bekerja sama dengan pihak yang berespekta untuk mencari solusi atau kesepakatan bersama. Astriani samaaali (2024), mediasi merupakan cara menangani konflik dengan menggunakan perantara dengan memberikan arahan kepada kedua pihak untuk mendapatkan jalan keluar dari

permasalahan tersebut. Wirawan (2010) dalam Nurul Hafifa (2018) mendefinisikan resolusi konflik melalui mediasi sebagai proses manajemen dimana pihak-pihak yang terlibat konflik menyelesaikan konflik mereka melalui negosiasi untuk mencapai kesepakatan bersama. Dalam hal ini pemerintah memiliki peran penting dalam menangani konflik dengan berperan sebagai mediator dengan indikator :

a) Mengumpulkan Fakta

Hal pertama yang harus dilakukan untuk memecahkan sebuah masalah adalah dengan mengumpulkan fakta. Mediasi dilakukan untuk memunculkan fakta-fakta penyebab terjadi konflik sehingga memudahkan pemerintah dalam membuat keputusan untuk pihak yang berkonflik. Langkah mediasi dilakukan untuk mendorong kedua belah pihak untuk menemukan solusi untuk menyelesaikan konflik mereka.

b) Menjalinkan Komunikasi Yang Terputus

Konflik yang terjadi dapat menciptakan terputusnya komunikasi antara kedua pihak. Maka pemerintah melakukan proses mediasi untuk mempertemukan kedua pihak untuk membangun kembali komunikasi yang terputus. Kolaborasi antara pemerintah setempat dan aparat keamanan memudahkan dalam mencari informasi dan menambah komunikasi yang diperlukan oleh mediator dalam mengambil keputusan.

c) Memperjelas Masalah

Dalam proses ini, pemerintah mempertemukan pihak terkait dan tokoh masyarakat untuk memperjelas masalah yang terjadi. Pihak yang terkait diharapkan dapat mempercepat proses penanganan permasalahan yang terjadi.

Pihak-pihak yang mengalami konflik dalam mediasi melakukan pendekatan untuk melakukan negoisasi. Negoisasi dapat dilakukan secara rahasia dan hanya diketahui pihak-pihak yang terlibat konflik atau negoisasi dapat juga secara terbuka diketahui oleh masyarakat. Unsur-unsur penting dalam mediasi antara lain yaitu Nurul Hafifa (2018) :

1. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan.
2. Mediator terlibat dan diterima para pihak yang bersengketa didalam perundingan.
3. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.
4. Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan selama perundingan berlangsung.
5. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang diterima pihak-pihak yang bersengketa untuk mengakhiri permasalahan yang terjadi.

2.1.2 Pengertian Pemerintah

Pemerintah atau disebut dengan government merupan sebuah lembaga atau badan publik yang mempunyai fungsi untuk mencapai tujuan negara. Secara umum, pemerintah didefinisikan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di suatu wilayah tertentu. Pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki :

- 1) Otoritas memerintah dari sebuah unit politik
- 2) Kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat

- 3) Aparatus yang merupakan badan pemerintahan yang berfungsi dan menjalankan kekuasaan
- 4) Kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan, untuk menangani perselisihan serta membuat keputusan atas kekuasaan yang sah.

Oktaviani (2024) Pemerintah merupakan bentuk organisasi yang memenuhi dan melaksanakan tugas mengatur sistem pemerintahan dan menetapkan kebijakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh negara. Peran pemerintah dalam pengembangan hubungan sosial antara lain :

- a) Pemerintah sebagai regulator, dalam hal ini pemerintah menyusun kebijakan atau regulasi untuk menstabilkan pemeliharaan pembangunan. Lynch (2021) dimana jika terdapat kurangnya regulasi yang jelas dan penegakan yang tidak konsisten dapat memicu pelanggaran dan ketegangan antar pengguna ruang publik. Sebagai regulator pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat untuk mengatur segala kegiatan dalam bermasyarakat.
- b) Pemerintah sebagai katalisator, pemerintah memimpin keterlibatan masyarakat ketika muncul masalah dalam proses pembangunan untuk mempertahankan pembangunan daerah.
- c) Pemerintah sebagai mediator, menciptakan kondisi kerja yang kondusif untuk mengoptimalkan pembangunan daerah. Pemerintah memberikan dukungan melalui pelatihan, pendidikan, dan pengembangan keterampilan.

Menurut Fahrudin, dkk (2022), pemerintah hakekatnya bertugas untuk melayani masyarakat dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap masyarakat yang akan mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya untuk mencapai tujuan bersama, dengan demikian birokrasi publik bertanggung jawan

dan berkewajiban untuk memberikan pelayanan publik yang baik serta profesional. Pemerintah merujuk pada semua tindakan atau proses administratif yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang memiliki wewenang untuk menjalankan kekuasaan dengan tujuan untuk mencapai sasaran tertentu.

Tujuan utama adanya pemerintah adalah untuk mengatur dan menjaga ketertiban dalam bermasyarakat. Pemerintah merupakan pelayan masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap masyarakat untuk mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi kemajuan bangsa. Pemerintah menentukan berbagai kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan negara, memperkirakan arah perkembangan masyarakat dan negara pada masa yang akan datang dan mempersiapkan langkah-langkah untuk membuat perkembangan yang lebih maju. Oleh karena itu, kegiatan pemerintah lebih menyangkut pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik dalam rangka mencapai tujuan masyarakat dan negara (Kadir,2021).

Pemerintah memiliki kewenangan yang berkaitan erat dengan asas legalitas, asas legalitas berarti semua kebijakan dan ketentuan yang mengikat warga negara harus didasarkan berdasarkan undang-undang. Tujuan pemerintah pada suatu negara pada umumnya didasarkan pada cita-cita atau tujuan negara. Tujuan pemerintahan negara indonesia sendiri adalah melindungi segenap bangsa indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan tujuan tersebut maka semua lembaga yang berada daalm sistem pemerintah indonesia bekerja sama untuk mewujudkan tujuan tersebut (Karso,2024).

Pemerintah merupakan lembaga atau organisasi yang memiliki kekuasaan untuk mengelola, mengatur, dan mengendalikan suatu urusan masyarakat dalam suatu wilayah. Dalam kehidupan negara, pemerintah memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga ketertiban, menyediakan pelayanan publik, serta melaksanakan peraturan dan hukum yang berlaku. Secara umum terdapat 4 fungsi pemerintah, yaitu:

1. Fungsi Pelayanan

Fungsi pelayanan yaitu memberikan pelayanan untuk memenuhi semua kebutuhan yang diperlukan oleh semua masyarakat dalam suatu negara.

2. Fungsi Pengaturan

Pemerintah memiliki fungsi untuk mengatur seluruh sektor dan kebijakan-kebijakan dalam bentuk undang-undang, peraturan daerah, dan peraturan lainnya agar terciptanya stabilitas negara dan pertumbuhan negara.

3. Fungsi Pembangunan

Fungsi pembangunan merupakan fungsi sekunder. Fungsi ini akan dijalankan ketika kondisi masyarakat dan negara melemah.

4. Fungsi Pemberdayaan

Fungsi pemberdayaan dijalankan ketika masyarakat tidak memiliki kemampuan atau skill tertentu. Dalam hal ini pemerintah akan melakukan pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan dan meningkatkan kualitas masyarakat.

2.1.3 Konflik Sosial

1. Pengertian Konflik Sosial

Konflik adalah keadaan yang muncul akibat adanya perbedaan pendapat atau perspektif antara kelompok, individu, atau organisasi. Konflik berawal dari

hal-hal kecil, seperti perbedaan pendapat, pandangan atau kurangnya kemampuan menerima perbedaan orang lain. Konflik sosial merupakan interaksi sosial yang terjadi akibat perbedaan kepentingan, nilai, maupun tujuan antar individu atau kelompok dalam masyarakat. Menurut Soekanto (2020), konflik sosial tidak selalu berkonotasi negatif, karena dapat menjadi pemicu perubahan sosial jika dikelola dengan baik. Dalam konteks perdagangan, konflik biasanya terjadi karena perebutan sumber daya ekonomi seperti lokasi strategis atau pembeli. Konflik sosial dianggap sebagai sumber utama perkembangan masyarakat yang ingin maju ke tahap kehidupan yang lebih baik.

1. Teori konflik sosial

Teori konflik sosial menganggap bahwa konflik merupakan bagian dari kehidupan sosial yang tidak dapat dihindari. Konflik karena adanya perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok yang memiliki sumber daya terbatas. Burton (2020) menyatakan bahwa konflik timbul ketika kelompok-kelompok bersaing merebutkan sumber daya yang terbatas. Dalam konteks pedagang di Sport Center Kota Blitar, konflik antar pedagang bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perbedaan dalam penggunaan ruang, aksesibilitas konsumen, dan peraturan yang diterapkan oleh pemerintah setempat (Cosser, 2020; Galtung 2021).

Konflik bisa terjadi secara natural atau bahkan terencana, konflik yang terjadi harus dikelola dengan baik agar dapat memunculkan perubahan yang lebih baik. Teori ini memberikan landasan bagi pemahaman konflik sebagai suatu dinamika sosial yang harus ditangani dengan bijaksana oleh pemerintah dan pihak terkait lainnya.

2. Teori Manajemen Konflik

Manajemen konflik adalah proses yang digunakan untuk mengelola, menyelesaikan, dan meredam ketegangan dalam situasi konflik. Dengan manajemen yang tepat, konflik tidak hanya dapat diselesaikan, tetapi juga dapat dijadikan peluang untuk memperbaiki hubungan dan meningkatkan kinerja suatu lembaga atau organisasi. Menurut Mu'alimin et al (2024) terdapat lima gaya utama dalam manajemen konflik berdasarkan pendapat Thomas-Khilmann yaitu, kompetitif, kolaboratif, menghindar, akomodatif, dan kompromi. Pemerintah dalam hal ini, berperan dalam memilih strategi yang paling efektif untuk mengelola konflik antar pedagang, misalnya dengan cara mediasi, negosiasi, atau pemberian solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Manajemen konflik yang efektif melibatkan komunikasi yang baik antara semua pihak dan mengalokasikan sumber daya yang tepat, sehingga dapat menyelesaikan konflik secara damai dan adil.

3. Teori Peran Pemerintah

Teori peran pemerintah dalam manajemen konflik berfokus pada fungsi pemerintah sebagai mediator dan fasilitator dalam menyelesaikan masalah yang timbul di masyarakat. Menurut Schein (2023), pemerintah tidak hanya bertanggung jawab dalam menyusun kebijakan, tetapi juga dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan pendekatan yang tepat agar hasilnya dapat diterima oleh seluruh pihak. Dalam konteks ini, pemerintah diharapkan dapat merancang strategi untuk mengatasi konflik antara pedagang yang berlangsung di Sport Center Kota Blitar dengan pendekatan yang mengutamakan keadilan dan kesejahteraan bersama.

4. Konsep Konflik antar pedagang

Konflik antar pedagang merupakan fenomena yang sering terjadi di berbagai wilayah. Konflik antar pedagang adalah situasi yang terjadi ketika dua atau lebih pedagang mengalami ketegangan terkait dengan masalah seperti kurangnya ruang untuk berdagang, persaingan lokasi yang strategis, perbedaan harga atau kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Konflik yang terjadi bisa berimbas pada penghasilan pedagang dan stabilitas sosial di kawasan tersebut (Rahim, 2022). Pada kasus yang terjadi pada Sport Center Kota Blitar, konflik disebabkan oleh perebutan lokasi yang strategis dan perbedaan pemahaman terkait pembagian lahan yang diberikan oleh pemerintah.

5. Konsep Penyelesaian Konflik Melalui Pendekatan Kolaboratif

Pada proses penyelesaian konflik ini lebih menekankan pada proses kompromi, negoisasi, dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Pendekatan kolaboratif dalam penyelesaian konflik mengutamakan kerja sama antara pihak-pihak yang terlibat. Menurut Fisher & Ury (2020), model kolaboratif dalam penyelesaian konflik mengutamakan pencapaian hasil yang saling menguntungkan dengan melibatkan semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian. Dalam kasus yang terjadi pada Sport Center Kota Blitar, pemerintah dapat berperan sebagai mediator untuk mencapai solusi yang adil bagi para pedagang, melalui dialog dan pembahasan berbagai alternatif penyelesaian masalah yang ada.

2. Jenis dan Penyebab Konflik Ekonomi Antar Pedagang

Konflik merupakan permasalahan yang tidak dapat dipisahkan dalam

kehidupan sosial, terutama konflik yang terjadi pada pusat ekonomi seperti tempat perbelanjaan dan tempat perdagangan. Lawolo (2023) menjelaskan jenis-jenis konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yaitu :

- 1) Konflik dalam diri individu, konflik ini terjadi ketika individu menghadapi ketidakpastian tentang pekerjaan yang diharapkan.
- 2) Konflik antar individu dalam organisasi, pada konflik ini terjadi karena perbedaan kepribadian setiap individu dalam organisasi tersebut.
- 3) Konflik antara individu dan kelompok, konflik ini berhubungan dengan cara individu menanggapi tekanan yang terjadi dalam kelompok tersebut.
- 4) Konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama, dalam hal ini biasanya terjadi karena pertentangan kepentingan antar kelompok tersebut.
- 5) Konflik antar organisasi, konflik organisasi terjadi sebagai akibat dari persaingan ekonomi dalam sistem perekonomian.

Konflik sosial yang terjadi di masyarakat tentunya dipengaruhi atau disebabkan oleh berbagai permasalahan. Terdapat berbagai macam faktor yang menyebabkan terjadinya konflik, begitupun konflik yang terjadi antar pedagang di area Sport Center Kota Blitar. Konflik kecil yang tidak segera diatasi dapat menyebabkan konflik bertambah menjadi besar. Carlolina (2021) menyebutkan bahwa fakto-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik yaitu :

1. Adanya perbedaan pendapat antara individu atau kelompok yang tidak mendapatkan penyelesaian sehingga menimbulkan konflik.
2. Adanya perbedaan kebudayaan yang mempengaruhi pola pikir dan perilaku, perbedaan tersebut dapat memicu terjadinya pertentangan atau konflik.
3. Adanya perbedaan kepentingan dan tujuan antara individu atau kelompok.

4. Adanya perubahan sosial yang relatif cepat.

Konflik ekonomi antar pedagang biasanya terjadi akibat persaingan perebutan sumber daya ekonomi yang tersedia, dan perbedaan kepentingan. Konflik yang terjadi antar pedagang sendiri biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Persaingan yang tidak sehat dan kesenjangan ekonomi
2. Ketidaksesuaian kebijakan relokasi dan revitalisasi
3. Ketidakjelasan regulasi dan penataan
4. Perbedaan kepentingan dalam pengelolaan pasar

Konflik antar pedagang dapat diklasifikasikan menjadi 2 bentuk yaitu konflik laten dan manifest. Konflik laten biasanya berakar pada kesenjangan ekonomi. Fisher (2001) Konflik laten bersifat tersembunyi dan perlu diangkat untuk dapat ditangani. Sedangkan konflik manifest sering muncul dalam bentuk perselisihan terbuka. Pada konflik laten yang terjadi berupa ancaman internal antar pihak yang berkonflik dan belum menimbulkan suatu tindakan atau aksi yang dapat diketahui khalayak publik.

Sedangkan pada konflik manifest, konflik sudah diketahui oleh khalayak umum dan menyita perhatian berbagai pihak serta membutuhkan campur tangan pihak lain untuk menyelesaikannya. Dewi (2022) menyebutkan bahwa penyebab konflik antar pedagang umumnya meliputi kompetisi tidak sehat, ketidakadilan distribusi lokasi dagang, dan lemahnya regulasi yang mengatur tata niaga.

3. Peran Pemerintah dalam Resolusi Konflik Sosial

Resolusi konflik merupakan upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan atau mencari kesepakatan untuk memecahkan konflik yang terjadi. Menurut Pitana dan Gayatri (dalam Fahrudin dkk, 2022), menjelaskan pemerintah memiliki peran sebagai motivator dalam menangani konflik, yang pertama peran pemerintah sebagai motivator digunakan agar dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Kedua, sebagai fasilitator, pemerintah berperan dalam menyediakan fasilitas dalam penyelesaian konflik. Ketiga, sebagai dinamisator, pemerintah, swasta, dan masyarakat harus dapat bersinergi dengan baik.

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menciptakan stabilitas sosial, termasuk di ruang ekonomi mikro seperti pasar. Nugroho (2020) menjelaskan bahwa peran pemerintah dalam meredam konflik meliputi fasilitas dialog, pembuatan regulasi yang adil, serta tindakan mediasi atau arbitrase jika diperlukan. Di tingkat lokal, pemerintah kota dapat bertindak sebagai mediator dengan menerapkan pendekatan partisipatif berbasis komunitas.

Peran pemerintah dalam menyelesaikan konflik dengan teori Schulte Nordholt (dalam Lawolo 2023), dijelaskan dengan indikator sebagai berikut :

1. Arbitrase

Pengambilan keputusan pada proses ini adalah arbiter yang juga bertugas mengendalikan proses yang terjadi. Seorang arbiter harus netral. Arbiter menerima masalah, materi latar belakang, gagasan yang kemudian memutuskan penyelesaian masalah. Hasil dari keputusan tersebut adalah kompromi, yang merupakan apa yang diinginkan oleh pihak yang bertikai berdasarkan penilaian teknis dan bukti.

2. Pemerintah sebagai negosiator

Dalam negoisasi kedua belah pihak saling mempengaruhi agar salah satu pihak terpengaruh dan menerima apa yang menjadi keinginan pihak lain. Aktivitas dalam negoisasi disebut juga dengan lobbying. Kesepakatan dalam negoisasi dengan lobbying sangat efektif karena negoisasi bisa terjadi apabila lobbying mendapat respon dari pihak yang berkonflik.

3. Mediator

Berkaitan dengan peran pemerintah dalam menyelesaikan konflik antara masyarakat dengan perusahaan maupun masyarakat dengan masyarakat, perlu dilakukan langkah-langkah yang baik untuk mempertemukan pihak yang berkonflik agar mereka bisa menyampaikan secara langsung keluhan dan tuntutan dalam pertemuan. Pertemuan dapat dimanfaatkan oleh mediator untuk menggali informasi yang berkaitan dengan konflik yang terjadi. Mediator dapat membantu mengumpulkan fakta, membuat hubungan komunikasi menjadi lebih baik, memperjelas masalah serta memberikan jalan untuk memecahkan masalah yang terjadi.

4. Strategi dalam Menangani Konflik

Konflik sosial merupakan proses alami yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Konflik merupakan proses manusia untuk bertumbuh dan berkembang menjadi lebih baik. Untuk menyelesaikan sebuah permasalahan atau konflik yang timbul diperlukan strategi yang tepat.

1. Kolaborasi

Kolaborasi merupakan salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Dengan kolaborasi diharapkan dapat

menemukan solusi yang menguntungkan untuk pihak-pihak yang mengalami permasalahan. Menurut Raharja & Sam'un (dalam Fakhri Widiyanto, 2021) kolaborasi merupakan upaya untuk mengumpulkan berbagai pihak dengan kepentingan berbeda untuk menghasilkan visi bersama, membangun kesepakatan mengenai suatu masalah, menciptakan solusi untuk masalah tersebut, dan mengedepankan nilai-nilai bersama untuk menghasilkan keputusan yang menguntungkan untuk semua pihak.

Hananto et al. (2024) menyatakan bahwa kolaborasi tidak hanya membantu menyelesaikan konflik, tetapi juga menciptakan hubungan yang lebih kuat antara anggota tim. Dalam pendekatan kolaboratif memungkinkan semua pihak untuk berkontribusi secara aktif dalam menemukan solusi yang memuaskan untuk pihak yang terlibat konflik.

2. Membuat Kebijakan Yang Adil

Kebijakan publik merupakan instrumen yang sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan publik yang timbul di suatu pemerintahan atau negara. Menurut Thomas R.Dye (dalam Subianto, 2020), kebijakan publik merupakan segala hal yang dipilih atau tidak dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan. Maksudnya adalah tindakan yang diambil pemerintah, baik secara implisit maupun eksplisit dianggap sebagai kebijakan dan pemerintah memiliki pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tersebut. Kebijakan publik adalah tindakan pemerintah untuk menanggapi sebuah masalah.

Pembuatan kebijakan yang adil merupakan strategi yang dapat diterapkan dalam menangani permasalahan atau konflik yang terjadi. Kebijakan yang adil dan inklusif dapat digunakan untuk menyelesaikan dan meredam konflik. Kebijakan

publik berisi keputusan pemerintah yang bersifat mengikat, kebijakan bertujuan untuk memecahkan masalah yang ada secara keseluruhan. Dian Suluh Kusuma Dewi (2022) menjelaskan dalam membuat kebijakan tahap formulasi kebijakan merupakan proses yang dilaksanakan secara teratur dengan melibatkan aktor yang memegang kebijakan untuk menghasilkan keputusan dalam memecahkan masalah.

Berikut merupakan nilai yang mempengaruhi tindakan para pembuat keputusan :

1. Nilai Politik

Kebijakan publik tidak boleh terlepas dari aspek politik, jika kebijakan terlepas dari aspek politik, maka hasil dari kebijakan akan miskin lapangannya, karena kebijakan publik tidak pernah terlepas dari aspek-aspek politik.

2. Nilai Organisasi

Keputusan dari kebijakan yang ditetapkan diambil dari dasar-dasar di organisasi. Keputusan tersebut bisa mempengaruhi organisasi dan dapat menerima dan mengimplementasikannya.

3. Nilai Pribadi

Keputusan dibuat dari dasar nilai-nilai pada individu masing-masing untuk dianut dan membuat keputusan untuk mempertahankan reputasinya.

4. Nilai Ideologi

Nilai ideologi merupakan landasan dalam membuat kebijakan.

5. Nilai Kebijakan

Keputusan yang dibuat dengan persepsi pembuatan kebijakan untuk kepentingan publik yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan nilai ini pembuatan kebijakan lebih mengetahui masalah, cara menggunakan informasi.

2.1.4 Pengertian Pedagang

Pedagang merupakan orang yang memperjual belikan barang dagangannya kepada konsumen. Seseorang dapat menjual dagangannya kepada konsumen sehingga konsumen bisa memperoleh barang yang dibutuhkan. Pedagang juga dapat memperoleh laba atau keuntungan dari dagangannya. Pedagang kaki lima (PKL) dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun sarana usaha tidak bergerak, menggunakan prasarana kota fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan, dan bangunan milik pemerintah atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap. Pemberdayaan pedagang merupakan upaya pemerintah, untuk dunia usaha dan masyarakat dalam membentuk pertumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap pedagang sehingga mampu tumbuh dan berkembang.

Pedagang memiliki karakteristik pribadi wirausaha, antara lain mampu mencari dan menangkap peluang usaha, memiliki keuletan, percaya diri dan kreatif, serta inovatif. Pedagang memiliki potensi dan dapat dimanfaatkan sebagai berikut:

1. Pedagang tidak dapat dipisahkan dari unsur budaya dan eksistensinya tidak dapat dihapuskan.
2. Pedagang dapat dipakai sebagai penghias kota apabila ditata dengan baik.
3. Pedagang menyimpan potensi pariwisata.
4. Pedagang dapat menjadi pembentuk estetika kota jika dikelola dengan baik.

Menurut Sari (2024) jenis-jenis pedagang diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu :

1. Pedagang Besar atau Distributor

Pedagang besar atau pedagang distributor merupakan pedagang yang membeli dan mendapatkan produk dagangan dari tangan pertama atau produsen secara langsung.

2. Pedagang Menengah atau Agen Grosir

Agen merupakan pedagang yang membeli atau mendapatkan barang dagangannya dari distributor atau agen tunggal yang kemudian akan diberikan harga yang lebih kecil atau murah.

3. Pedagang Eceran

Pedagang ecer merupakan pedagang yang menjual barang ke konsumen secara eceran atau satuan.

4. Importir

Importir merupakan perusahaan yang mempunyai fungsi menyalurkan barang dari luar negeri ke dalam negeri.

5. Eksportir

Dalam kegiatan pedagang ekspor perusahaan memiliki fungsi untuk menyalurkan barang dari dalam negeri ke luar negeri.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan studi ini:

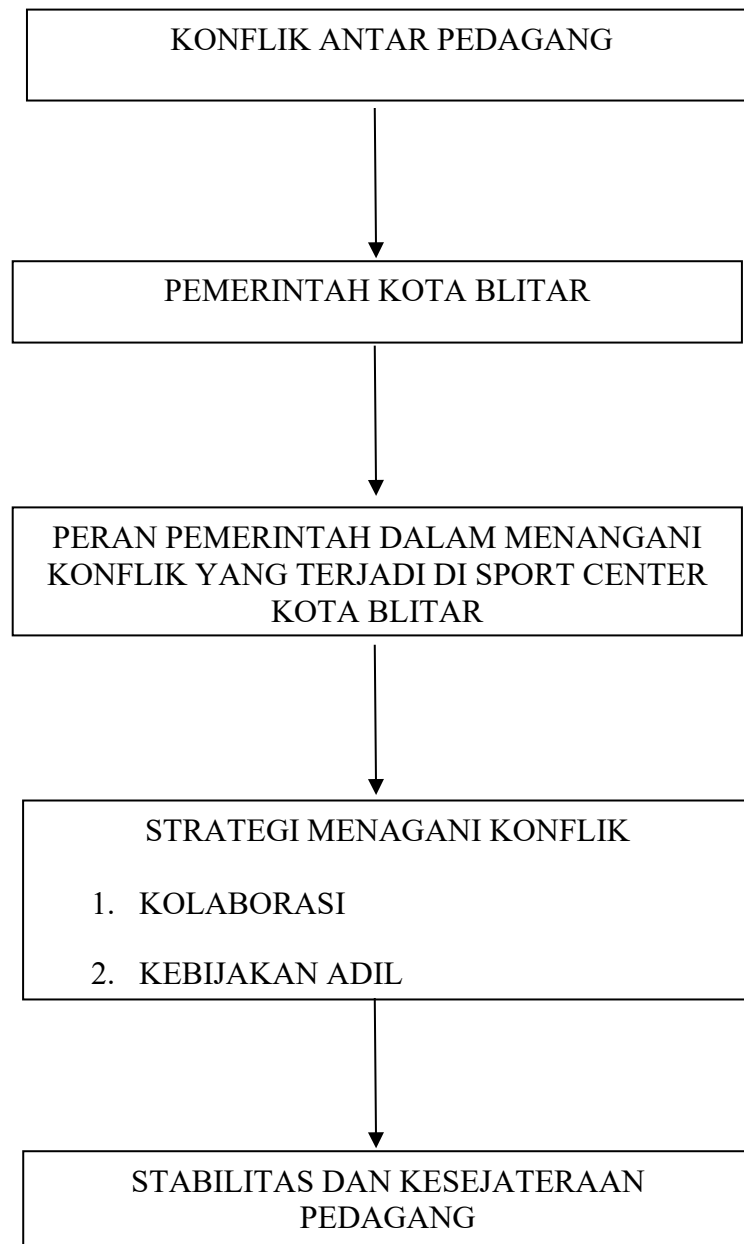
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

Judul	Pengarang	Tahun	Ringkasan
Peranan Pemerintah Dalam Penanganan Konflik Sosial Pada Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang	Lestari Lawolo	2023	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam menangani konflik sosial pada Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan pendekatan dekkriptif melalui metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan lurah dalam penanganan konflik sosial pada kelurahan tersebut dengan memberikan edukasi dan pemahaman mengenai keberagaman suku, budaya, dan agama. Selain itu Lurah juga memberi pengertian mengenai memupuk toleransi, kerja sama, gotong royong, saling menghargai dan menghormati antar suku, agama dan bangsa. Peran lurah dalam menagani konflik tersebut juga dengan menggandeng pihak kepolisian, TNI, serta tokoh masyarakat dalam permasalahan tersebut.
Strategi Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Konflik Sosial Untuk Mewujudkan Stabilitas Wilayah (Studi Kasus di Kota Bandung)	Dhiapari, Danny, Rina	2024	Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan untuk menangani konflik dalam permasalahan tesebut adalah penguatan kapasitas institusi pemerintah, pembentukan regulasi yang relevan, serta melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Namun dalam penyelesaiannya masih diperlukan langkah tambahan yaitu penguatan kolaborasi antar stakeholder, pemanfaatan teknologi untuk deteksi dini, peningkatan kapasitas masyarakat dan aparat.

Judul	Pengarang	Tahun	Ringkasan
			Hambatan yang dialami pemerintah kota Bandung yaitu keterbatasan struktural seperti keterbatasan kapasitas institusional, kurangnya koordinasi antar lembaga dan keterbatasan anggaran sumber daya .
Konflik Pedagang Pasar dan Pemerintah Dalam Kebijakan Relokasi Pasar Tradisional Di Kabupaten Ponorogo	Andita Eka Permatasari dan Agus Machfud Fauzi	2022	Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik yang digunakan menggunakan teori Ralf Dahrendorf dimana pemerintah sebagai pemegang otoritas dan kekuasaan. Peran pemerintah dalam konflik ini dengan melakukan pendekatan dengan para pedagang maupun paguyuban. Upaya pengendalian konflik juga dilakukan melalui proses mediasi, dimana kepala Kejaksaan negeri Ponorogo bertindak sebagai mediator.
Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Konflik Menahun Masyarakat Adat Dengan Perusahaan Perkebunan Karet di Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung	Sahrul, Sumaryo, Kordinaya, Tubagus, Yuniar	2023	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam proses penyelesaian konflik yang terjadi. Hasil penelitian ini menunjukkan pemerintah sudah berperan baik dalam penyelesaian konflik melalui mediasi dan pemerintah daerah kemudian berperan sebagai fasilitator. Mereka membantu memfasilitasi pertemuan, dialog. Atau negoisasi antara berbagai pihak yang terlibat konflik.
Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Konflik Sosial Di Pekon Sukaraja Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus	Henni, Lies, Eka	2020	Hail penelitian ini menunjukkan bahwa konflik terjadi disebabkan adanya perbedaan pendirian, budaya dan faktor kepentingan. Upaya pemerintah dalam mengatasi konflik yang terjadi di Pekon Sukaraja diketahui bahwa tingkat keberhasilan terlihat dari beberapa proses yang dilalui seperti konsolidasi, mediasi, dan arbitrase. Melalui proses mediasi masyarakatn terintegrasitas dan menjadi satu kesatuan sistem.

Berdasarkan beberapa rujukan dari penelitian terdahulu, penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang sama-sama membahas mengenai bagaimana peran pemerintah dalam menangani konflik yang sedang terjadi. Perbedaan penelitian terdahulu lebih umum membahas mengenai keberhasilan peran pemerintah dalam menangani konflik, sedangkan penelitian sekarang lebih spesifik meneliti peran pemerintah dalam menangani konflik yang terjadi dengan memperhatikan faktor penyebab konflik dan bentuk konflik yang terjadi. Dengan ini penelitian sekarang ini melengkapi studi sebelumnya dengan menelaah secara mendalam mengenai peran pemerintah dalam menangani konflik yang terjadi dengan memperhatikan faktor penyebab dan bentuk konflik yang terjadi.

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Gambar Alur Kerangka Pemikiran

Sumber : Data diolah tahun 2025

Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan yang terjadi di Sport Center Kota Blitar yaitu munculnya pedagang baru yang menyebabkan pedagang lama tidak terima dengan kehadiran pedagang baru, sehingga menyebabkan konflik antar pedagang serta aktivitas perdagangan menjadi tidak nyaman. Konflik juga disebabkan dengan adanya berbagai permasalahan lain seperti perebutan lapak, persaingan tidak sehat, serta ketegangan akibat masuknya pedagang baru tanpa koordinasi yang jelas. Konflik ini menciptakan lingkungan berdagang yang tidak kondusif dan merugikan pedagang serta mengganggu ketertibab umum di area Sport Center Kota Blitar.

Pemerintah Kota Blitar sebagai aktor yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menjaga ketertiban serta memfasilitasi kesejahteraan masyarakat, termasuk pedagang yang berada di area Sport Center Kota Blitar. Pemerintah tidak hanya dipandang sebagai pengambil kebijakan, tetapi diharapkan dapat mampu bertindak secara proaktif dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di ruang publik. Peran pemerintah dalam menangani permasalahan yang terjadi di Sport Center Kota Blitar merupakan fokus utama dalam penelitian ini, dimana peneliti akan menganalisis bagaimana peran pemerintah dalam mengidentifikasi masalah, merespon dan mengimplementasikan berbagai intervensi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi.

Dalam menjalankan perannya, pemerintah melakukan berbagai strategi dalam menangani konflik yang terjadi. Strategi ini dapat berupa kolaborasi dan pembuatan kebijakan yang adil dalam penyelesaian konflik. Dengan strategi penyelesaian tersebut dapat menciptakan stabilitas perdagangan yang adil dan merata, serta meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi pedagang.